

Tren Korupsi Kesehatan Periode 2010-2015

INDONESIA CORRUPTION WATCH

Organisasi Presentasi



I. Latar Belakang

II. Tujuan

III. Metodologi

IV. Temuan

V. Kesimpulan/Rekomendasi

Contents 1

Contents 2

I. Latar Belakang



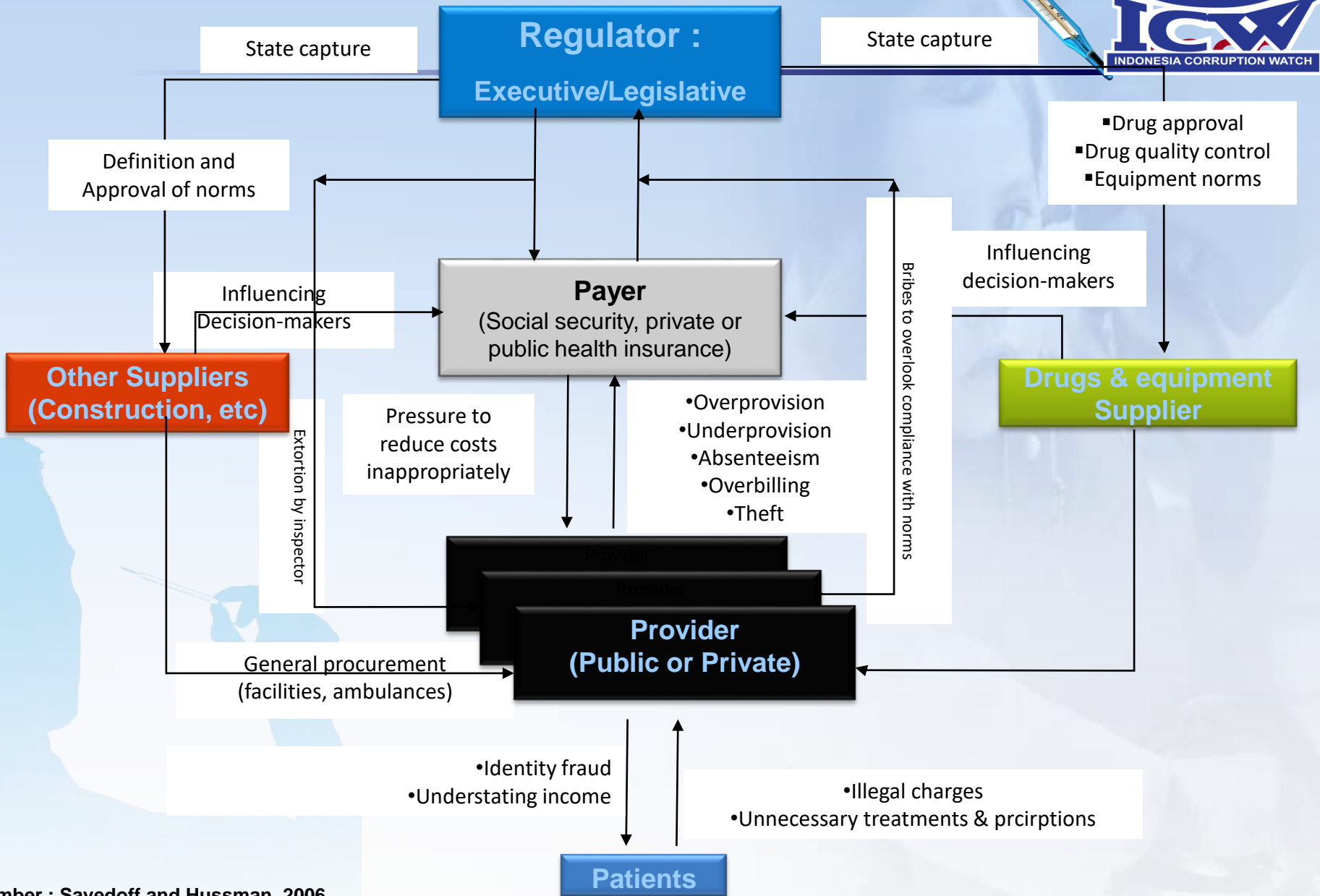
- Kesehatan merupakan sektor dasar yang menjamin hak kesehatan sehat warga
- Anggaran kesehatan (APBN dan APBD) selalu meningkat setiap tahun
- Pengelolaan anggaran kesehatan masih kurang efisien dan rawan korupsi
- Program kesehatan pemerintah menjadi tidak efektif.
- Derajat kesehatan rakyat Indonesia masih belum menunjukkan performa yang baik

Tujuan



- Secara umum laporan ini bertujuan untuk mendorong perbaikan sistem penganggaran dan pengelolaan anggaran kesehatan disemua jenjang pemerintah mulai dari pusat dan daerah.
- Secara khusus laporan bertujuan untuk :
 - Memberikan gambaran titik rawan (pelaku, obyek korupsi, kerugian negara, modus, institusi dan lokasi) korupsi disektor kesehatan
 - Mengungkap kinerja penegak hukum dalam menindak korupsi disektor kesehatan
 - Menyediakan bahan untuk perbaikan sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran kesehatan diseluruh jenjang pemerintahan pusat dan daerah.

Kerangka Pemikiran



METODOLOGI



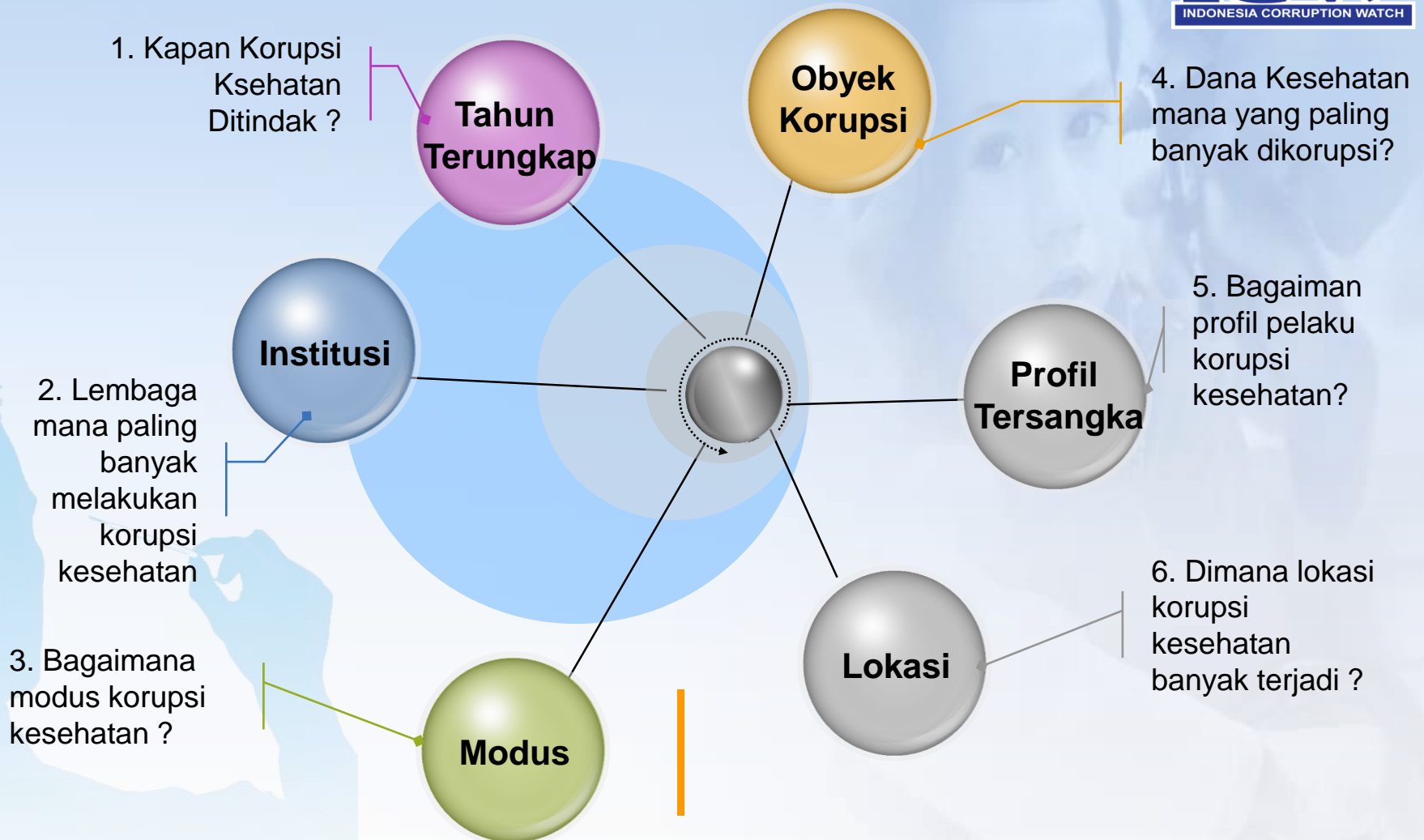
- Definisi :
 - Kasus korupsi yang terjadi disektor kesehatan dan penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) telah masuk tahap serta telah memiliki tersangka
- Sumber Data :
 - Kasus korupsi kesehatan yang telah diungkap pada publik baik melalui media cetak dan elektronik oleh penegak hukum

METODOLOGI



- Kelemahan :
 - Belum semua praktek korupsi kesehatan berhasil dijerat penegak hukum
 - Belum semua kasus korupsi kesehatan terutama yang sudah masuk tahap penyidikan diungkap pada publik oleh penegak hukum.
- Dengan kelemahan ini maka tren korupsi kesehatan terbatas mengungkap potret korupsi disektor kesehatan....!!!!

Diagram Presentasi Temuan



Hasil Dan Temuan Pemantauan



Kasus Korupsi
Kesehatan
Periode
Penindakan 2010-
2016

219
Kasus

Kerugian Negara : Rp 890,1 Miliar
Nilai Suap : Rp 1,6 Miliar

519
Tersangka

Korupsi Kesehatan Berdasarkan Tahun Terjadi & Tahun Penindakan



Tahun	Terjadi Korupsi	Tahun Dimulai Penyidikan
2003	1	
2004	3	
2005	4	
2006	4	
2007	13	
2008	17	
2009	29	
2010	26	13
2011	26	25
2012	53	23
2013	24	46
2014	17	43
2015	2	40
2016	0	29
Jumlah	219	219

1. Penindakan kasus korupsi sektor kesehatan mengalami peningkatan signifikan dalam periode 2013 sampai 2015.
2. Meningkatnya kasus korupsi kesehatan dalam periode ini disebabkan karena banyaknya korupsi kesehatan yang terjadi sebelum tahun 2013. Puncaknya, adalah pada tahun 2012 dimana APH menindak 53 kasus yang terjadi pada tahun ini.
3. Tingginya kasus korupsi yang terjadi pada sebelum dan sesudah tahun disebabkan karena penerapan e-katalog untuk PBJ sector kesehatan terutama alkes (alat kesehatan) dan obat-obatan. E-katalog diduga menjadi penyebab berkurangnya korupsi Alkes dan obat-obatan karena harganya sudah ditetapkan dalam e-katalog tersebut.
4. Namun demikian, terhadap alkes dan obat tertentu yang belum masuk dalam daftar e-katalog masih tetap rawan dikorupsi.

10 Obyek Korupsi Kesehatan Terbesar



No	Obyek Korupsi	Jumlah Kasus	Kerugian Negara (Rp Miliar)	Suap (Miliar)
1	Dana Alkes	107	543.1	0.5
2	Dana Jaminan Kesehatan	26	62.1	-
3	Infrastruktur Rumah Sakit	15	47.4	-
4	Dana Obat-obatan	13	24.6	-
5	Infrastruktur Puskesmas	13	83.0	-
6	Sarpras Rumah Sakit	9	5.0	-
7	Dana Alat Kontrasepsi	7	33.5	-
8	Sarpras Puskesmas	6	17.8	-
9	Dana Operasional Rumah Sakit	4	6.5	-
10	Pengadaan lahan Rumah Sakit	4	1.2	-

- Dana Alkes merupakan dana paling banyak dikorupsi 107 kasus dan Rp 543, miliar
- Ada pergeseran obyek korupsi kesehatan dimana dana obat-obatan mengalami penurunan peringkat yakni menjadi peringkat keempat dari sebelumnya peringkat kedua. Pemantauan ICW periode 2009-2013, korupsi pengadaan obat berada pada posisi kedua setelah alkes.
- Hal ini diduga karena penerapan e-katalog dalam pengadaan obat.
- Menarik, ada kenaikan peringkat obyek korupsi Dana Jaminan Kesehatan, seperti dana terutama dana BPJS Kesehatan dan dana jaminan kesehatan lainnya. Pemantauan ICW sebelumnya, jaminan kesehatan pada posisi kelima. Namun setelah penerapan BPJS Kesehatan, korupsi terkait Jaminan Kesehatan diduga semakin banyak. Contoh kasus adalah Kasus dana BPJS Subang dan lainnya.

Modus Korupsi Kesehatan



No	Modus	Jml Kasus	Kerugian Negara (Rp Miliar)	Suap/Gratifikasi (Rp Miliar)
1	Mark Up	93	512.9	-
2	Penyalahgunaan Anggaran	36	173.7	-
3	Penggelapan	33	70.0	-
4	Penyalahgunaan Wewenang	27	65.8	-
5	Kegiatan/Proyek Fiktif	11	26.9	-
6	Laporan Fiktif	7	24.2	-
7	Pemotongan / Penyunatan	7	16.2	-
8	Suap/Gratifikasi	4	-	1.6
9	Pemerasan	1	0.4	-
	Total	219	890.1	1.6

- Markup atau penggelembungan harga pengadaan barang dan jasa merupakan modus paling umum digunakan oleh pelaku korupsi kesehatan...!!!
- Penyalahgunaan anggaran dan penggelapan menjadi modus terbanyak karena diduga terkait dengan korupsi dana jaminan kesehatan

5 Lembaga Terbanyak Tempat Terjadi Korupsi



No	Lembaga Tempat Terjadi Korupsi	Jumlah Kasus	Kerugian Negara (Rp Miliar)	Suap (Rp Miliar)
1	Dinas Kesehatan	97	268.3	1.6
2	Rumah Sakit	89	380.8	-
3	Kemenkes	12	132.1	-
4	BKKBD	7	27.5	-
5	DPRD	5	3.5	-

- Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan tempat paling banyak terjadi korupsi yakni sekitar (97 kasus) dengan kerugian negara Rp 268,3 miliar dan suap Rp 1,6 miliar). Tingginya korupsi kesehatan ditingkat Dinas Kesehatan disebabkan karena PBJ dan pembangunan infrastruktur kesehatan berada dalam pengelolaan lembaga ini.

- Rumah sakit juga menjadi tempat terjadi korupsi terutama korupsi pengadaan alkes dan obat.
- Banyaknya rumah sakit menjadi tempat korupsi karena bantuan pengadaan alkes dan obat-obatan dilakukan oleh pihak rumah sakit sendiri.
- Korupsi Kemenkes relatif lebih sedikit disbanding Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit (12 Kasus). Namun dalam sisi kerugian negara sangat tinggi.

Lokasi Korupsi Kesehatan



No	Provinsi	Jumlah Kasus	Kerugian Negara (Rp juta)	Suap (Rp Juta)
1	Sumatera Utara	36	92,431.9	350.0
2	Jawa Barat	15	44,015.0	-
3	Nasional	14	48,092.7	-
4	NTT	13	28,957.7	-
5	Jawa Timur	11	31,545.0	528.0
6	Aceh	10	16,489.3	750.0
7	Kepulauan Riau	9	93,875.0	-
8	Lampung	9	52,988.0	-
9	Sulawesi Selatan	9	21,212.8	-
10	Banten	8	17,783.0	-
11	Jambi	8	29,251.0	-
12	Jawa Tengah	7	15,836.4	-
13	Sumatera Barat	7	22,851.0	-
14	Gorontalo	6	85,957.7	-
15	Kalimantan Tengah	6	40,237.0	-
16	Kalimantan Barat	5	92,776.2	-
17	Maluku	5	23,550.0	-
18	Riau	5	17,700.0	-
19	NTB	4	59,229.0	-
20	Sulawesi Barat	4	11,800.0	-
21	Bali	3	7,500.0	-
22	Kalimantan Selatan	3	2,674.3	-
23	Papua	3	2,687.8	-
24	Sulawesi Tengah	3	-	-
25	Sulawesi Utara	3	2,445.0	-
26	Bengkulu	2	4,862.0	-
27	Kalimantan Timur	2	914.0	-
28	Sumatera Selatan	2	6,200.0	-
29	DI Yogyakarta	1	9,000.0	-
30	DKI Jakarta	1	500.0	-
31	Kalimantan Utara	1	379.1	-
32	Kepulauan Bangka Belitung	1	500.0	-
33	Maluku Utara	1	4,900.0	-
34	Papua Barat	1	-	-
35	Sulawesi Tenggara	1	1,000.0	-
	Total	219	890.140.9	1.628,0

- Sumatera Utara (Pemprov, Pemkab/Pemkot) merupakan provinsi dengan kasus korupsi kesehatan paling banyak (36 kasus dan kerugian negara Rp 92,4 Miliar).
- Jabar menempati posisi kedua mencapai 15 kasus dengan kerugian negara Rp 44,0 miliar
- Nasional (K/L Pemerintah Pusat) urutan ketiga dengan jumlah kasus 14 dan kerugian negara Rp 48,1 miliar.
- Selain itu, kasus korupsi di Kepulauan Riau, Gorontalo, dan Kalimantan Barat perlu mendapat perhatian mengingat dengan jumlah kasus relative sedikit namun kerugian negara besar.

Tersangka Korupsi Kesehatan



No	Jabatan/Status Tersangka	Frekuensi	Persentase
1	PNS	295	56,8
2	Swasta	112	21,6
3	Bupati	5	1,0
4	DPR/DPRD	5	1,0
5	Direksi BUMN	3	0,6
6	Jaksa	3	0,6
7	Karyawan BUMN/BUMD	3	0,6
8	Menkes	2	0,4
9	Gubernur	1	0,2
10	Istri Bupati	1	0,2
11	Istri PNS	1	0,2
12	Wakil Walikota	1	0,2
13	Walikota	1	0,2
14	Tidak Diketahui	86	16,6
	Total	519	100,0

- PNS masih mendominasi pelaku korupsi. Dari 519 tersangka korupsi, 56,8 persen atau 295 orang berstatus PNS/ASN.
- PNS/ASN bekerjasama dengan swasta (rekanan/penyedia) dalam melakukan korupsi kesehatan. Terdapat 112 orang atau 21,6 persen tersangka kasus korupsi berasal dari swasta.
- Meski, PNS/ASN dan swasta aktor pelaku korupsi, namun atasan mereka atau pihak lain yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran kesehatan juga terlibat.

- Terdapat 2 Menkes, 1 Gubernur, 5 Bupati, 1 Walikota, 1 Wakil Walikota, 6 Direksi dan karyawan BUMN/BUMD. Bahkan istri Bupati juga terlibat dalam korupsi kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi kesehatan tidak hanya dilakukan oleh ASN saja akan tetapi juga melibatkan penyelenggara negara terkait dengan penanggaran dan pengelolaan anggaran kesehatan.

Rincian Jabatan Tersangka Kasus Korupsi Kesehatan yang Berasal dari ASN/PNS



No	Jabatan	Frekuensi	Perseentase
1	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota	49	27.8
2	PPK	48	27.3
3	Direktur RS	35	19.9
4	PPTK	17	9.7
5	Pokja ULP/Panitia Lelang	16	9.1
6	Sekda	5	2.8
7	Kepala BKKBD	2	1.1
8	PPHP	2	1.1
9	Rektor	1	0.6
10	Sekjen Kemenkes	1	0.6
	Total	176	100.0

- Dari total 295 orang ASN/PNS yang menjadi tersangka korupsi, 176 orang diantaranya adalah pejabat tinggi dimasing-masing jenjang pemerintahan.
- Di Kemenkes terdapat 1 Sekjen Kemenkes dan beberapa Dirjen yang terlibat korupsi kesehatan di lembaga tersebut.
- Sementara di tingkat Provinsi, Sekda dan Kepala Dinas Kesehatan juga merupakan pihak yang cukup banyak terlibat kasus korupsi.
- 49 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota selama periode 2010-2015 terjerat kasus korupsi kesehatan/

Selain pejabat tinggi pemerintahan, PNS biasa yang memegang jabatan dalam pengadaan juga banyak menjadi tersangka korupsi. Mereka antara lain PPK (49 orang), PPTK (17 orang), Pokja ULP (17 orang) dan PPHP 2 orang).

Hal ini menunjukkan PBJ sektor kesehatan terutama PBJ alkes menjerat banyak ASN/PNS sebagai tersangka kasus korupsi

Penyebab Korupsi Sektor Kesehatan



1. Besarnya tekanan politik (pembiayaan politik) membuat anggaran kesehatan rawan dikorupsi. Hal ini terjadi karena aktor politik yang berada dipemerintahan menjadikan anggaran kesehatan sebagai salah satu sumber pendanaan politiknya.
2. Tata kelola anggaran kesehatan masih buruk. Transparansi masih rendah terutama keterbukaan atas dokumen pengadaan (KAK, HPS, Spek Teknis, Kontrak, BAST dsb). Pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terutama prosedur pengadaan serta kurangnya partisipasi publik.
3. Reformasi birokrasi juga belum efektif karena masih banyak pejabat eselon 1 sampai eselon 4 yang terlibat kasus korupsi. Tekanan atasan (penyelenggara negara) atas ASN serta integritasnya masih rendah.
4. Pengendalian internal dan system pengawasan internal pemerintah belum efektif.

Kesimpulan



1. Anggaran Kesehatan masih sangat rawan korupsi. Titik rawan terutama terjadi pada pengadaan alkes dan jaminan kesehatan. Pengadaan alkes rawan karena memiliki nilai anggaran yang tinggi dan memiliki spesifikasi teknis unik. Jaminan kesehatan juga rawan dikorupsi karena meningkatnya anggaran kesehatan untuk jaminan kesehatan pasca diberlakukannya program JKN (Jaminan kesehatan Nasional).
2. Terjadi pergeseran obyek korupsi kesehatan terutama korupsi dana obat-obatan pada korupsi jaminan kesehatan. Dua penyebab diduga pemicu hal ini terjadi yakni, pemberlakuan e-katalog dalam pengadaan obat dengan produsen obat dan kedua pemberlakuan INA-CBG's dalam BPJS Kesehatan. Dua hal ini menyebabkan harga obat dalam pengadaan di faskes dasar dan tingkat lanjut tidak dapat dimark up karena telah ditentukan harganya. Pergeseran korupsi obat menjadi penyelewengan dana jaminan kesehatan .
3. Modus korupsi paling banyak masih penggelembungan harga. Hal ini terjadi karena sebagian besar korupsi yang ditindak penegak hokum adalah korupsi dalam PBJ dimana keuntungan diperoleh melalui penggelembungan harga.

Kesimpulan



1. Sumut adalah provinsi dimana pemprov, pemkab dan pemkotnya banyak melakukan korupsi kesehatan. Hal ini tentu menarik karena banyak provinsi besar lainnya tapi tidak memiliki korupsi kesehatan sebanyak provinsi ini. Hal ini mungkin disebabkan sistem pencegahan korupsi disektor kesehatan ini belum optimal atau penegak hukum didaerah ini memiliki kinerja penindakan yang baik.
2. PNS/ASN bekerjasama dengan penyedia barang adalah pihak paling banyak menjadi tersangka korupsi. Hal ini terjadi karena PNS, baik dari jabatan tinggi seperti Sekjen atau Sekda sampai PNS biasa, memiliki kewenangan yang tinggi dalam PBJ.
3. Direktur Rumah Sakit dan Kepala Dinas Kesehatan merupakan pejabat paling banyak menjadi tersangka korupsi
4. Penyelenggara negara terutama Menkes, Anggota DPR/DPRD, Gubernur, Bupati, Walikota dan Direksi BUMN juga banyak terlibat sebagai pelaku korupsi. Hal ini membuktikan bahwa korupsi kesehatan tidak hanya dilakukan sendiri oleh PNS akan tetapi juga ditentukan oleh penyelenggara negara atasan mereka.

Rekomendasi



- **Kemenkes :**

- Kemenkes konsisten menggunakan paradigma sehat dalam menyusun prioritas anggaran kesehatan. Kenaikan anggaran kesehatan setiap tahun harus selalu meningkatkan persentase anggaran untuk promotif dan preventif dan bukan kuratif.
- Kemenkes mempertajam Stranas PPK (Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) sehingga aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat menyentuh jantung korupsi dilingkungan Kemenkes.
- Adanya kebijakan nasional pencegahan korupsi kesehatan yang menysasar pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa serta fraud dalam pelayanan kesehatan
- Perlu adanya kebijakan *open contracting* yakni membuka semua dokumen pengadaan (KAK, HPS, Spesifikasi Teknis, Kontrak dan Berita Acara Seriah Terima Barang) pada publik.

- **DPR/Komisi Kesehatan :**

- DPR konsisten menggunakan paradigma sehat dalam menetapkan prioritas alokasi anggaran kesehatan dimana anggaran promotif dan preventif lebih besar dibanding kuratif dan rehabilitatif.
- DPR menutup semua celah korupsi kesehatan terutama ketika menggunakan kewenangan penganggaran dalam penyusunan anggaran kesehatan

- **Penegak Hukum :**

- Menyelesaikan utang perkara korupsi kesehatan yang belum lunas pada tahun 2013. Mabes Polri menjelaskan pada publik terkait perkembangan penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan.
- Memprioritaskan penindakan korupsi kesehatan.



Thank You!

